

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 050/ 61 TAHUN  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPTEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024-2026**

**Sasaran**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Laju Investasi Dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Pertumbuhan Realisasi Investasi

**Program**

No	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Meningkatnya Informasi Peluang Usaha yang disediakan	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan

2	Meningkatnya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2. Program Promosi Penanaman Modal	2. Presentase promosi penanaman modal
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	3. Program Pelayanan Penanaman Modal	3. Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik
4	Meningkatnya Perizinan yang diterbitkan tepat waktu		4. Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu
5	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat		5. Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani
6	Meningkatnya Penanganan gugatan hukum di dalam pengadilan		6. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
7	Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Hambatan kemudahan Berusaha	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	7. Persentase Fasilitasi Hambatan Kemudahan Berusaha
8	Tersusunnya dokumen perizinan dan non perizinan	5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8. Jumlah Dokumen pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal

#### KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
1	Terlaksananya Pembuatan Peta	Pembuatan Peta Potensi Investasi	1. Jumlah Pembuatan Peta	Terlaksananya	Penyediaan Peta Potensi dan	1. Jumlah Peta Potensi

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
	Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pengawasan Desa	Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2. Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota
3	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3. Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

				Terlaksananya Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4. Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
4	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4. Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
				Terlaksananya Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	6. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi

				Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risik		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risik
				Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	7. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
5	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan	5. Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi	Tersusunnya Data dan Informasi Perizinan dan Non	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan	8. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan

	dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
--	--	--	--	--	--	--



a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196411141990031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 050/ TAHUN  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPTEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024-2026**

**Sasaran**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Laju Investasi Dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Pertumbuhan Realisasi Investasi

**Program**

No	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Meningkatnya Informasi Peluang Usaha yang disediakan	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan

2	Meningkatnya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2. Program Promosi Penanaman Modal	2. Presentase promosi penanaman modal
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	3. Program Pelayanan Penanaman Modal	3. Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik
4	Meningkatnya Perizinan yang diterbitkan tepat waktu		4. Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu
5	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat		5. Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani
6	Meningkatnya Penanganan gugatan hukum di dalam pengadilan		6. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
7	Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Hambatan kemudahan Berusaha	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	7. Persentase Fasilitasi Hambatan Kemudahan Berusaha
8	Tersusunnya dokumen perizinan dan non perizinan	5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8. Jumlah Dokumen pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal

**KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
1	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
2	Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2. Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Desa	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2. Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3. Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
4	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4. Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Terlaksananya Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5. Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
5	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5. Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
				Terlaksananya Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risik	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	7. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risik

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
				<p>Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</p>	<p>Pengawasan Penanaman Modal</p>	<p>8. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</p>
6	<p>Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan</p>	<p>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan</p>	<p>6. Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi</p>	<p>Tersusunnya Data dan Informasi Perizinan dan Non</p>	<p>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan</p>	<p>9. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan</p>

	dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
--	--	--	--	--	--	--



a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196411141990031005